

EVALUASI DAMPAK DANA KELURAHAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Pradono Girsang¹; Ilmiawan Auwalin²

Universitas Airlangga, Kota Surabaya¹; Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Barat²

Email : pradono.girsang-2021@feb.unair.ac.id¹; pradonogirsang6@gmail.com²

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana kelurahan terhadap kemiskinan perkotaan di Indonesia. Alokasi anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 3 Trilyun pada tahun 2019 dan 2020 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana Kelurahan sesuai usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Data penelitian ini berasal dari Susenas Modul Tahun 2018 dan 2019 yang dikumpulkan oleh BPS. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis *Difference in Difference* (DiD), variabel independen yang digunakan: status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, bantuan sosial, status kawin kepala rumah tangga, lama sekolah kepala rumah tangga, WI sedangkan variabel dependen adalah kemiskinan perkotaan. Hasil dari penelitian menunjukkan setelah adanya dana kelurahan penurunan angka kemiskinan perkotaan tidak sebesar di pedesaan, variabel bekerja, anggota rumah tangga, bantuan rastra, bantuan bnpt, kawin, WI, lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan perkotaan.

Kata kunci : Kemiskinan; Dana kelurahan; *Difference in Difference*

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of urban village funds on urban poverty in Indonesia. The Kelurahan Fund budget allocation of Rp 3 trillion in 2019 and 2020 is used for community empowerment. The Kelurahan Fund was proposed by the Association of Indonesian Municipalities. Data derived from Susenas Modules 2018 and 2019 collected by BPS. This study uses the quantitative approach of Double Difference (DiD) analysis, the independent variables used: working status of the household head, number of household members, social assistance, marital status of the household head, length of schooling of the household head, WI while the dependent variable is urban poverty. The results of the study show that after the existence of urban village funds, the decline in urban poverty is not as great as in rural areas, the variables of work, household members, Rastra assistance, bnpt assistance, marriage, WI, length of schooling have a negative effect on urban of poverty.

Keywords : Poverty; Urban Fund; Difference in Difference

PENDAHULUAN

Jurnal ini mengevaluasi efek dana kelurahan pada tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia dengan kelurahan sebagai variabel *treatment* dan desa sebagai variabel *control*. Penelitian ini memberi kontribusi pemahaman tentang dampak dana kelurahan (*urban fund*) karena beberapa alasan. Pertama penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 dan 2019 yang representatif secara nasional.

Kedua menggunakan metode analisis dampak yaitu *Double Difference* (DiD) untuk mengetahui kemiskinan perkotaan dari sebelum adanya dana kelurahan tahun 2018 dan setelah adanya dana kelurahan tahun 2019 di Indonesia. DiD punya daya tarik intuitif serta banyak digunakan untuk bidang ekonomi, kebijakan publik, penelitian kesehatan, manajemen, serta lainnya (Fredriksson dan Oliveira, 2019b). Penelitian Satiti dan Yuliana (2017) menyebutkan ada dua faktor yang memiliki andil dalam mempengaruhi status miskin atau tidak miskin rumah tangga bekerja di kota yaitu faktor ekonomi dan sosial. Lebih dari 40% populasi dunia ada dalam kemiskinan, hidup dibawah \$2 per harinya (Todaro dan Smith, 2015). Manfaat penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan berguna untuk analisa kebijakan pemerintah.

Indonesia punya andil untuk bisa mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan/SDG's dengan mencapai agenda pembangunan 2030. Sehubungan dengan hal tersebut, PP No. 59 Tahun 2017 tentang implementasi SDG's. Pada tahun 2015, sebesar 53,3% penduduk tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 63,4% pada tahun 2030 (Bapenas, 2019). Rentang periode Maret Tahun 2018-Maret Tahun 2019, penduduk miskin di kota berkurang 0,15 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,66 juta orang (BPS, 2019).

Buletin DPR RI (2018) menyebutkan alokasi dana kelurahan merujuk kinerja pelayanan dasar untuk umum yang dibagi dalam 3 kategori yang alokasinya yang berbeda tiap kelurahan. Christianingrum dan Nasution (2018) untuk kategori “baik” total alokasi sebesar Rp 353 juta, kategori “perlu ditingkatkan” sebesar Rp 370 juta, dan kategori “sangat perlu ditingkatkan” sebesar Rp 384 juta (lihat tabel 2.1). Desentralisasi fiskal lebih sesuai dengan permintaan barang publik lokal karena pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah mereka daripada pemerintah pusat. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mendistribusikan sumber daya yang lebih berimbang untuk merancang program pembangunan yang disesuaikan untuk kebutuhan daerah (Siburian, 2020). Liu *et al.*, (2017), menyebutkan desentralisasi fiskal memberikan keuntungan signifikan terhadap efisiensi belanja publik, dan potensi kerugian yang besar dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan wilayah. Mas'udin (2017) anggaran APBN dialokasikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), menciptakan lapangan pekerjaan (*pro job*), memberantas kemiskinan (*pro poor*), dan melestarikan lingkungan (*pro*

environment). Pengentasan masyarakat miskin sebaiknya didukung oleh kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat tidak mampu (*pro-poor budget*).

Pada PP Nomor 17 Tahun 2018, jumlah pagu dana kelurahan dari APBD minimal 5 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasal 30 (ayat 8), Pendanaan Kelurahan untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebanyak jumlah dana desa terendah yang diterima desa di kabupaten/kota. Dana kelurahan dari dana desa bagi yang belum memenuhi target *roadmap* pemenuhan dana desa yang ditargetkan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. Rumusan masalah dalam jurnal ini untuk melihat dampak dari dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perkotaan di Indonesia dari sebelum dan sesudah adanya dana kelurahan pada tahun 2018 dan 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Hubungan keuangan pusat serta daerah dalam wujud transfer fiskal (desentralisasi fiskal) ditemukan di berbagai negara. Pengalihan tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan pemerintahan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Stimulan anggaran diasumsikan dapat mendorong kegiatan ekonomi di perdesaan dan memberikan efek ekonomi, yang menyebabkan implikasi yang kuat terhadap berkurangnya celah antara perdesaan dan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mendistribusikan sumber daya yang lebih berimbang untuk merancang program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Siburian, 2020).

Dana Kelurahan

Sebelum dana kelurahan pada tahun 2019, kelurahan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintah pusat. Dana kelurahan adalah DAU Tambahan untuk masing-masing kabupaten/kota yang diberikan untuk setiap kelurahan melalui kecamatan. Alokasi pengiriman dana dari pemerintah pusat ke daerah terjadi selama TA 2019 dan TA 2020. PMK Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Kelurahan pada pasal 6 (2) menyatakan: Dana Kelurahan setiap kabupaten/kota dibagikan secara merata serta berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi afirmasi; alokasi kinerja; dan alokasi formula (PMK, 2020).

Kemiskinan Perkotaan

(World Bank, 2013) beberapa prioritas kebijakan untuk strategi mengentaskan kemiskinan kota, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk miskin perkotaan. Program tersebut dikategorikan dalam dua bidang: (1) program ekonomi dan urbanisasi; dan (2) program sosial dan selaras dengan bukti global untuk strategi pengentasan kemiskinan. *World Bank Report* (2013) menyebutkan perbedaan utama untuk rumah tangga kota miskin dan tidak miskin dalam hal dengan pendidikan, pekerjaan, ukuran rumah tangga, akses ke layanan, jaminan kepemilikan dan kondisi perumahan. Kepala rumah tangga perkotaan yang miskin lebih cenderung mengandalkan wirausaha dan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi pekerja berupah atau bergaji jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, menunjukkan pentingnya pekerjaan sektor informal oleh penduduk miskin. Kaum miskin di kota pendidikannya lebih rendah daripada kaum tidak miskin sekitar sepertiganya memiliki pendidikan kurang dari sekolah dasar. Hasil ini sesuai dengan profil masyarakat miskin kota pada beberapa negara berkembang.

TNP2K (2013) dalam laporannya menyebutkan kelompok miskin di kota diidentifikasi memiliki beberapa permasalahan utama yakni: (1) pendapatan tidak memadai; (2) kesulitan mencari pekerjaan; (3) biaya sekolah; (4) infrastruktur yang buruk dan kekurangan modal. Salah satu program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan kala itu adalah Program PNPM-Perkotaan dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan untuk memajukan tata kelola dan menyiapkan layanan di tingkat daerah. Kota selain menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat juga memiliki manfaat internal dan eksternal, juga harus mencukupi manfaat eksternal untuk menyediakan ketersediaan kota dilingkupnya yang memiliki hierarki lebih kecil, maka diadakan kerjasama lintas daerah (UU No. 26, 2007).

Boonperm, Haughtoon dan Khander (2009) menganalisis dampak dari *Village and Urban Revolving Fund* (VRF) pada pendapatan rumah tangga, pembelanjaan dan akumulasi aset. Data panel bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Thailand tahun 2002 dan 2004. Dampak pinjaman terhadap pengeluaran dan pendapatan lebih besar dampaknya jika peminjam adalah perempuan daripada laki-laki (Boonperm *et al.*, 2009). Somsook Boonyabanha (2009) penelitian dilakukan di Thailand dan merupakan publikasi dari *United Nation*. Program ini ditandai dengan berdirinya kantor pengembangan masyarakat perkotaan (UCDO) di Thailand untuk mengatasi kemiskinan perkotaan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mengatasi masalah

perumahan, mata pencaharian dan layanan dasar. Penelitian menunjukkan total dana UCDO meningkat sebanyak 120 persen (dari 1.250 juta baht pada tahun 1992 menjadi 2.800 juta baht pada tahun 2007). Program kesejahteraan bermanfaat dalam kegiatan kesejahteraan seperti dana untuk biaya sekolah, dana untuk orang sakit, dana untuk lansia, dan dana untuk keadaan darurat di masyarakat. Penelitian Sripanich *et al.*, (2015) saat pemerintah Thailand mengambil keputusan tentang dana pembangunan kota tingkat nasional akan dibentuk dengan dukungan keuangan dari gabungan dana pemerintah dan uang bantuan internasional.

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian memakai data sekunder jenis data panel, gabungan data *cross section* dan data *time series*. Variabel dalam studi terbagi atas dua yaitu: (1) Variabel Kategori: persentase rumah tangga miskin, persentase penduduk laki-laki; persentase penduduk dengan status kawin; persentase penduduk bekerja; persentase rumah tangga individu penerima bansos PKH; persentase rumah tangga individu penerima bansos rastra; persentase rumah tangga individu penerima bansos BPNT; (2) Variabel Numerik: rata-rata pengeluaran per kapita; rata-rata jumlah anggota rumah tangga; rata-rata lama sekolah; rata-rata *Wealth Index*.

Gujarati (2003) menyimpulkan tiga cara memprediksi data panel: (1) *Pooled Least Square* (PLS), memanfaatkan gabungan semua data (*pooled*), maka terdapat $N \times T$ observasi, di mana N menunjukkan jumlah titik waktu yang digunakan; (2) *Fixed Effects Model* (FEM), asumsinya adalah terdapat perbedaan antar individu, yang diakomodasi dalam intersep setiap individu; (3) *Random Effects Model* (REM), asumsinya terdapat perbedaan intersep setiap individu dan intersep tersebut variabel acak atau stokastik. Metode *Difference in Difference* (DiD) mempunyai daya tarik intuitif serta telah banyak dipakai pada bidang ekonomi, kebijakan publik, penelitian kesehatan, manajemen, dan lainnya (Fredriksson dan Oliveira, 2019b). DiD bermanfaat juga di bidang ekonomi empiris, misalnya untuk memperkirakan dampak kebijakan tertentu dan perubahan kebijakan yang tidak mempengaruhi setiap orang pada waktu dan cara bersamaan (Lechner, 2010).

Model ekonometri DiD menggunakan 2 periode observasi yaitu sebelum dan sesudah dana kelurahan. Periode sebelum dana kelurahan (*baseline period*) tahun 2018, dibandingkan dengan periode setelah ada dana kelurahan tahun 2019. Dengan demikian, dampak dana kelurahan dapat dianalisa. Berikut model yang digunakan dalam penelitian:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot Period_t + \beta_2 DK_i + \beta_3 Period_t * DK_i + \alpha X_{it} + \varepsilon_{it} \dots (3.1)$$

Kelompok *treatment*: Rumah Tangga di Perkotaan; Kelompok *control*: Rumah Tangga di Pedesaan (sudah sejak 2015 di pedesaan ada Dana Desa). Periode sebelum Dana Kelurahan: 2018; Periode setelah Dana Kelurahan: 2019; DK: Kode 1 untuk kelurahan dan kode 0 untuk desa.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Memberantas kemiskinan dengan program bantuan sosial yang besar serta kebijakan pembangunan berbasis masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di daerah pedesaan dan perkotaan. Program bansos yaitu subsidi beras Raskin, program jaminan kesehatan Jaminan kesehatan masyarakat, program BLT Bersyarat/ Program PKH, dan Beasiswa Tunai Miskin (BSM). Nguyen (2013) untuk mengurangi kemiskinan secara keseluruhan, kebijakan di daerah perkotaan harus memberikan perhatian tidak hanya pada masyarakat miskin perkotaan, tetapi juga pada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, yang cenderung memperkuat keterkaitan antara desa dan kota dalam pembangunan Vietnam. Bagian pembahasan menelaah menurut hasil estimasi *Difference in Difference* pada model 1 dan model 2. Di mana pada model 1 estimasi dilakukan untuk pengaruh variabel dana kelurahan terhadap kemiskinan. Sedangkan pada model 2, analisis hasil estimasi dilakukan dengan memasukkan variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu: bekerja, anggota rumah tangga, bantuan pkh, bantuan rastra, bantuan bnpt, individu laki-laki, kawin, WI dan lama sekolah. Hasil analisis *Difference in Difference* pada model 1 tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa rata-rata kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,475 persen hasil DiD menunjukkan kelompok sebelum dan sesudah dana kelurahan tidak signifikan. Analisis *Difference in Difference* pada model 2 dengan menggunakan variabel kontrol dengan model FEM menggunakan variabel kontrol didapat kemiskinan perkotaan tahun 2019 sebesar 0,292 persen. Menurut uji Hausman menunjukkan nilai prob > chi2 yakni

0,0000 < 0,05. Bahwa berarti model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect* (FE) atau menerima H1 (lihat tabel 4.1).

Estimasi model 2 *Difference in Difference* dengan menggunakan variabel kontrol, didapat status bekerja memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Hal menjelaskan bahwa semakin banyak yang bekerja maka akan mengurangi kemiskinan dipertkotaan begitupula sebaliknya. Banyaknya anggota keluarga yang bekerja menurunkan kemiskinan untuk satu keluarga Adrianto (2016). Status pekerjaan memiliki andil untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga yang terlihat dari jenis pekerjaannya, pendapatan serta produktifitasnya dalam bekerja. Status pekerjaan terdiri dari dua bagian yaitu sektor formal dan informal. Hasil estimasi variabel kontrol jumlah anggota rumah tangga memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti semakin sedikit banyaknya anggota rumah tangga akan mengurangi kemiskinan begitupula sebaliknya. Halimah (2012) dalam penelitiannya menyebutkan banyaknya anggota rumah tangga berdampak untuk kemiskinan, sebab jumlah tanggungannya banyak, dapat dipengaruhi karena beberapa faktor yakni banyak anak, ada tidaknya anggota keluarga yang tidak produktif serta sulitnya bagi anggota keluarga dalam memperoleh pekerjaan dalam umur masih produktif. Hasil estimasi variabel bantuan rastra dan bnpt yang memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti semakin banyak bantuan yang diberikan di masyarakat kota maka akan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perkotaan begitupula sebaliknya. Dalam rencana strategi *Asian Development Bank/ADB* pada tahun 2030 mengakui peran perlindungan sosial investasi dalam berkontribusi pada pertumbuhan inklusif dengan mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial membantu memastikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan, berkelanjutan, dan menjangkau semua sektor populasi (ADB, 2019). Hasil estimasi variabel kontrol jumlah individu laki-laki memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Sekhampu (2013) jenis kelamin KRT tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kemiskinan. Ketidaksetaraan gender membuat perempuan dan anak perempuan lebih rawan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki (World Bank, 2012) dan mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan bereaksi terhadap perubahan status kemiskinan. Hasil estimasi variabel kawin menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan. Sari (2018) dari hasil penelitiannya didapat untuk status perkawinan KRT, status bekerja

KRT, dan banyak anak dirumah tangga signifikan mempengaruhi taraf kemiskinan rumah tangga. Jika KRT berstatus cerai, rumah tangga anak lebih rawan untuk tergolong miskin dibandingkan jika KRT status kawin. Whiteford dan Adema (2007) menyatakan kecenderungan angka kemiskinan anak serta hubungan antara status bekerja orang tua, jumlah orang tua bekerja, serta status perkawinan orang tua terhadap kemiskinan anak di negara anggota OECD dengan memanfaatkan data OECD *Income Distribution*, studi dengan hasil observasi yang didapat meningkatnya kerawanan kemiskinan mempunyai korelasi dengan peningkatan rumah tangga dengan orang tua tunggal dan tingginya angka pengangguran. Hasil estimasi variabel lama sekolah menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan. Observasi ini sesuai dengan Soetjoto (2020) yang menyimpulkan rata-rata lama sekolah memiliki efek negatif serta signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada aparatur kelurahan dalam hal ini Sekretaris Lurah dan Kepala Lurah bahwa pada tahun 2019 sejak pertama kalinya anggaran dana kelurahan didapat dari pemerintah daerah yang disalurkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Bahwa untuk alokasi penggunaan anggaran dana kelurahan sudah langsung terperinci alokasi penggunaannya dari pemerintah daerah tanpa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan atau tanpa melalui pengajuan aspirasi kelurahan.

KESIMPULAN

Pada model 1 *Difference in Difference* tanpa menggunakan variabel kontrol, menunjukkan bahwa rata-rata kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,475 persen hasil DiD menunjukkan kelompok sebelum dan sesudah dana kelurahan tidak signifikan. Analisis *Difference in Difference* pada model 2 dengan menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa hubungan negatif antara dana kelurahan terhadap kemiskinan di perkotaan dimana kemiskinan diperkotaan sebesar 0,292 persen dan hasil DiD menunjukkan perbedaan kelompok sebelum dan sesudah dana kelurahan tidak signifikan.

REFERENSI

- Andrianto, Afrian. 2016, Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Sekitar Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol.4 No.3, Juli 2016
- Asian Development Bank., 2019. *The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and inequality in Asia and The Pacific*
- Bappenas., 2019. *Roadmap of SDGs A Highligh*

- BPS., 2019. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2019*
- Boonperm, J., Haughton, J., Khandker, S.R., 2009. *Does The Village Fund Matter In Thailand, Policy Research Working Papers.*, The World Bank., <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5011>
- Buletin Teknis No 4., 2006. Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
- Christianingrum, R., Nasution, M., n.d. Martha Carolina Adhi Prasetyo S. W. Rendy Alvaro 16., 2018. Dana Kelurahan dan Tantangannya. Buletin APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI
- Fredriksson, A., Oliveira, G.M. de, 2019b. *Impact Evaluation Using Difference-in-Differences*. RAUSP Manag. J. 54, 519–532. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-05-2019-0112>
- Gujarati, D.N., 2003. *Student solutions manual for use with “Basic econometrics,”* 4. ed. ed, McGraw-Hill higher education. McGraw Hill, Boston
- Halimah, Yufi. 2012. Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro. Vol., No. 1., Tahun 2012
- Lechner, M., 2010. *The Estimation of Causal Effects by Difference-in-Difference Methods Estimation of Spatial Panels*. Found. Trends® Econom. 4, 165–224. <https://doi.org/10.1561/08000000014>
- Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., Wu, A.M., 2017. *Fiscal Decentralization, Equalization, and Intra-Provincial Inequality in China*. Int. Tax Public Finance 24, 248–281. <https://doi.org/10.1007/s10797-016-9416-1>
- Mas'udin., 2017. Peran Belanja Pemerintah Pusat Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia
- Nguyen, T. L. H. (2013). *The challenges of developing research resources for leading Vietnamese universities*. Higher Education Management and Policy, 24(2), 115-130
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018., Tentang Kecamatan
- Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 8 Tahun 2020., 2020. Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
- Sari., Euis Naya. 2018., *The Effect Of Marital Status And Economic Condition On Children Poverty In Banten Province In 2017*
- Satiti, Qhory Kusuma dan Yuliana, Lia., 2017. Determinan Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja Di Perkotaan dan Perdesaan Provinsi NTB Tahun 2017
- Sekhampu, T. J. (2013). Determinants of Poverty in a South African Township. Journal of Social Sciences, 34(2), 145–153. <https://doi.org/10.1080/09718923.2013.11893126>
- Siburian, M.E., 2020. *Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence from Indonesia*. Appl. Econ. Lett. 27, 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Soejoto, M. N., 2020. Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 08 Nomor 01 Tahun 2020, 16-21, 17
- Somsook Boonyabancha, 2009. *Community Development Fund in Thailand: A Tool for Poverty Reduction and Affordable Housing, Human Settlements Financing Tools and Best Practices Series*. UN Habitat, Nairobi
- Sripanich, B., Nitivattananon, V., Perera, R., 2015. *City Development Fund: A Financial Mechanism to Support Housing and Livelihood Needs of Thailand's*

- Urban Poor. Habitat Int. 49, 366–374.
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.05.011>
- Todaro, M.P., Smith, S.C., 2015. *Economic Development*, Twelfth edition. ed. Pearson, Boston
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2013. *Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan*. Jakarta
- UU Nomor 26., Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang
- Whiteford, P. dan Adema, W., 2007., *What Works Best in Reducing Child Poverty: A Benefit or Work Strategy?*. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers No. 51 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- World Bank., 2012. *World Development Report 2012 Overview*
- World Bank., 2013. *Indonesia: Urban Poverty and Program Review*
- World Bank Report., 2013. *Introduction to Poverty Analysis*
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

LAMPIRAN

Tabel 2. 1 Alokasi Anggaran Dana Kelurahan Tahun 2019-Tahun 2020

	Dana Kelurahan 2019 (PMK 187/PMK.07/2018)	Dana Kelurahan 2020 (PMK 8/PMK.07/2020)
Kab/Kota dengan Kategori Baik	Rp 352.941.000,00 (2.805 kelurahan di 91 kabupaten/kota)	Rp 350.000.000,00
Kab/Kota dengan Kategori Perlu Ditingkatkan	Rp 370.138.000,00 (4.782 kelurahan di 257 kabupaten/kota)	Rp 366.000.000,00
Kab/Kota dengan Kategori Sangat Perlu Ditingkatkan	Rp 384.000.000,00 (625 kelurahan di 62 kabupaten/kota)	Rp 381.819.000,00

Tabel 4.1 Ringkasan Akhir DiD Dengan Menggunakan Variabel Kontrol

	POLS	FE	RE
Kelur	1,406161*** (0,133)		-1,096381*** (0,209)
Post	1,293*** (0,075)	-0,805*** (0,036)	-0,082*** (0,819)
1.kelur#1.post	-0,929*** (0,311)	0,292*** (0,482)	-0,206*** (0,618)
pct_bekerja	0,060 (0,192)	-0,070 (0,260)	-0,009 (0,841)
ang_ruta	1,229 (0,038)	-0,460 (0,438)	0,532 (0,274)
pct_tpkh	-0,513 (0,075)	0,012 (0,709)	0,008 (0,739)
pct_trastra	0,124 (0,000)	-0,018 (0,132)	0,026 (0,019)
pct_tbnpt	0,175 (0,000)	-0,040 (0,126)	0,029 (0,216)

pct_laki	0,107 (0,369)	0,339 (0,000)	0,306 (0,000)
pct_kawin	-0,460 (0,000)	-0,167 (0,046)	-0,371 (0,000)
WI	-1,685 (0,006)	-0,039 (0,936)	-0,293 (0,507)
lama_sekolah	-2,893 (0,000)	-1,851 (0,000)	-2,891 (0,000)
_cons	36,029*** (0,000)	18,941*** (0,014)	25,599*** (0,000)
N	1.822	1.822	1.822

tstatistic in parentheses

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Tabel Hasil Estimasi DiD Tingkat Kemiskinan

DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ESTIMATION RESULTS

Number of observations in the DIFF-IN-DIFF: 1822

	Before	After	
Control:	454	454	908
Treated:	457	457	914
	911	911	

Outcome var.	pct_m~n	S. Err.	t	P> t
Before				
Control	12.060			
Treated	6.193			
Diff (T-C)	-5.867	0.707	-8.30	0.000***
After				
Control	10.953			
Treated	5.718			
Diff (T-C)	-5.235	0.707	7.40	0.000***
Diff-in-Diff	0.632	1.000	0.63	0.527

R-square: 0.06

* Means and Standard Errors are estimated by linear regression

Inference: * p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

Tabel Deskripsi Statistik Kelurahan dan Pedesaan Tahun 2018 dan 2019

Variabel	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Obs.	Mean	Std. Dev	Obs.	Mean	Std. Dev
<i>Kelurahan</i>							
Persentase Penduduk Rumah Tangga miskin	persen	457	6,192	6,977	457	5,718	6,509
Persentase Penduduk Bekerja	persen	457	44,533	4,855	457	44,781	5,231
Persentase Penduduk status kawin	persen	457	46,233	4,695	457	46,301	4,827
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima PKH	persen	457	7,200	5,866	457	10,847	7,530
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima Rastra	persen	457	24,099	19,028	457	10,866	14,599
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima BNPT	persen	457	0,921	3,250	457	6,586	9,140
Rata-rata jumlah anggota Rumah Tangga	jiwa	457	4,689	0,600	457	4,686	0,588
Rata-rata lama sekolah	tahun	457	7,792	0,823	457	7,803	0,836

		index	457	2,407	0,541	457	2,380	0,319
Rata-rata <i>Wealth Index</i>								
Rata-rata pengeluaran per kapita	Rupiah		457	1.194.898	312.129,1	457	1.206.603	326.214
			Tahun 2018			Tahun 2019		
<i>Pedesaan</i>			Obs.	Mean	Std. Dev	Obs.	Mean	Std. Dev
Persentase Penduduk Rumah Tangga miskin	persen	454	12,059	13,849	454	10,952	13,175	
Persentase Penduduk Bekerja	persen	454	46,428	6,214	454	46,652	6,397	
Persentase Penduduk status kawin	persen	454	48,107	5,569	454	48,107	5,521	
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima PKH	persen	454	14,488	10,262	454	18,076	11,459	
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima Rastra	persen	454	45,221	21,676	454	24,146	23,411	
Persentase Penduduk Rumah Tangga penerima BNPT	persen	454	0,640	3,917	454	8,513	12,382	
Rata-rata jumlah anggota Rumah Tangga	jiwa	454	4,647	0,647	454	4,600	0,582	
Rata-rata lama sekolah	tahun	454	6,232	0,982	454	6,457	0,970	
Rata-rata <i>Wealth Index</i>	index	454	1,634	0,375	454	1,803	0,233	
Rata-rata pengeluaran per kapita	Rupiah	454	900.649,7	226.839,2	454	960.860	241.905,2	

Tabel Model DiD Dengan Variabel Kontrol

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	1,822
Model	54786.2225	12	4565.51854	F(12, 1809)	=	49.57
Residual	166614.311	1,809	92.102991	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.2475
				Adj R-squared	=	0.2425
Total	221400.533	1,821	121.581841	Root MSE	=	9.597

pct_miskin	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
kelur	1.406161	.9356779	1.50	0.133	-.4289613 3.241284
post	1.29346	.7257789	1.78	0.075	-.1299925 2.716913
1.kelur	0 (omitted)				
1.post	0 (omitted)				
kelur#post					
1 1	-.9294121	.9165427	-1.01	0.311	-2.727005 .8681813
pct_bekerja	.060959	.0466609	1.31	0.192	-.0305559 .152474
ang_ruta	1.229152	.5932609	2.07	0.038	.0656034 2.3927
pct_tpkh	-.0513298	.028811	-1.78	0.075	-.107836 .0051765
pct_trastra	.1241717	.0148083	8.39	0.000	.0951286 .1532149
pct_tbnpt	.1757069	.0349703	5.02	0.000	.1071205 .2442933
pct_laki	.1079162	.1200051	0.90	0.369	-.127447 .3432793
pct_kawin	-.4603126	.069688	-6.61	0.000	-.5969901 -.3236351
WI	-1.685358	.6116211	-2.76	0.006	-2.884916 -.4858004
lama_sekolah	-2.893955	.2686568	-10.77	0.000	-3.420865 -2.367045
_cons	36.02967	8.772315	4.11	0.000	18.82474 53.2346

Tabel Panel FE – Model DiD Dengan Variabel Kontrol

Fixed-effects (within) regression
Group variable: locid

Number of obs = 1,822
Number of groups = 911

R-sq:
within = 0.0573
between = 0.1648
overall = 0.1530

Obs per group:
min = 2
avg = 2.0
max = 2

corr(u_i, Xb) = 0.2070

F(11,900) = 4.98
Prob > F = 0.0000

pct_miskin	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
kelur	0 (omitted)					
post	-.8056392	.383087	-2.10	0.036	-1.557487	-.0537914
1.kelur	0 (omitted)					
1.post	0 (omitted)					
kelur#post						
1 1	.2929557	.4160505	0.70	0.482	-.5235865	1.109498
pct_bekerja	-.070647	.0627102	-1.13	0.260	-.1937222	.0524282
ang_ruta	-.4600365	.5932494	-0.78	0.438	-1.62435	.7042768
pct_tpkh	.0120509	.032301	0.37	0.709	-.051343	.0754449
pct_trastra	-.0189871	.01261	-1.51	0.132	-.0437354	.0057613
pct_tbnpt	-.0403743	.0263698	-1.53	0.126	-.0921278	.0113792
pct_laki	.3398741	.0864888	3.93	0.000	.170131	.5096172
pct_kawin	-.1670411	.0834188	-2.00	0.046	-.3307591	-.0033231
WI	-.0396533	.4903675	-0.08	0.936	-1.00205	.9227435
lama_sekolah	-1.851952	.5220747	-3.55	0.000	-2.876577	-.8273261
_cons	18.9416	7.723604	2.45	0.014	3.783226	34.09997
sigma_u	9.9448733					
sigma_e	4.113436					
rho	.85390926	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(910, 900) = 9.85 Prob > F = 0.0000

Tabel Panel RE - Model DiD Dengan Variabel Kontrol

Random-effects GLS regression	Number of obs =	1,822
Group variable: locid	Number of groups =	911
R-sq:	Obs per group:	
within = 0.0378	min =	2
between = 0.2405	avg =	2.0
overall = 0.2235	max =	2
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(12) =	303.34
	Prob > chi2 =	0.0000

pct_miskin	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
kelur	-1.096381	.8728818	-1.26	0.209	-2.807198	.6144359
post	-.0825492	.3615361	-0.23	0.819	-.791147	.6260485
1.kelur	0 (omitted)					
1.post	0 (omitted)					
kelur#post						
1 1	-.206363	.4138379	-0.50	0.618	-1.01747	.6047444
pct_bekerja	-.0090893	.0453962	-0.20	0.841	-.0980641	.0798855
ang_ruta	.5324102	.4869949	1.09	0.274	-.4220823	1.486903
pct_tpkh	.0085101	.0254966	0.33	0.739	-.0414624	.0584825
pct_trastra	.0262254	.0111729	2.35	0.019	.004327	.0481239
pct_tbnpt	.0296181	.0239236	1.24	0.216	-.0172713	.0765076
pct_laki	.3060986	.0802536	3.81	0.000	.1488044	.4633927
pct_kawin	-.3710833	.0617757	-6.01	0.000	-.4921613	-.2500052
WI	-.2934076	.4416835	-0.66	0.507	-1.159091	.5722762
lama_sekolah	-2.891229	.2942056	-9.83	0.000	-3.467861	-2.314596
_cons	29.59902	6.64711	4.45	0.000	16.57093	42.62712
sigma_u	8.5535689					
sigma_e	4.113436					
rho	.81217114	(fraction of variance due to u_i)				

Tabel Hasil Statistik POLS – DiD Dengan Robust Std. Error

Linear regression	Number of obs	=	1,822
	F(12, 1809)	=	31.08
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.2475
	Root MSE	=	9.597

pct_miskin	Robust		t	P> t	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
kelur	1.406161	1.006514	1.40	0.163	-.5678909	3.380214
post	1.29346	.9595204	1.35	0.178	-.588424	3.175345
1.kelur	0 (omitted)					
1.post	0 (omitted)					
kelur#post						
1 1	-.9294121	.9482083	-0.98	0.327	-2.78911	.9302862
pct_bekerja	.060959	.0592285	1.03	0.304	-.0552044	.1771224
ang_ruta	1.229152	.724107	1.70	0.090	-.1910219	2.649326
pct_tpkh	-.0513298	.0483289	-1.06	0.288	-.1461162	.0434566
pct_trastra	.1241717	.0239985	5.17	0.000	.077104	.1712394
pct_tbnpt	.1757069	.0421637	4.17	0.000	.0930122	.2584016
pct_laki	.1079162	.146654	0.74	0.462	-.1797128	.3955451
pct_kawin	-.4603126	.0941025	-4.89	0.000	-.6448735	-.2757517
WI	-1.685358	.6766663	-2.49	0.013	-3.012488	-.3582288
lama_sekolah	-2.893955	.4423337	-6.54	0.000	-3.761494	-2.026417
_cons	36.02967	10.35511	3.48	0.001	15.72045	56.3389

Tabel Hasil Statistik Uji Hausman

. hausman fe re

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
post	-.8056392	-.0825492	-.72309	.1266779
kelur#post				
1 1	.2929557	-.206363	.4993187	.0428514
pct_bekerja	-.070647	-.0090893	-.0615577	.0432638
ang_ruta	-.4600365	.5324102	-.9924467	.3387932
pct_tpkh	.0120509	.0085101	.0035409	.0198312
pct_trastra	-.0189871	.0262254	-.0452125	.0058462
pct_tbnpt	-.0403743	.0296181	-.0699924	.0110918
pct_laki	.3398741	.3060986	.0337755	.0322439
pct_kawin	-.1670411	-.3710833	.2040422	.0560577
WI	-.0396533	-.2934076	.2537543	.2130163
lama_sekolah	-1.851952	-2.891229	1.039277	.431283

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \chi^2(11) &= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) \\ &= 111.52 \\ \text{Prob}>\chi^2 &= 0.0000 \\ & (V_b-V_B \text{ is not positive definite}) \end{aligned}$$